REKONSTRUKSI KETENTUAN MANFAAT EKONOMI DAN TATA KELOLA DALAM PERATURAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA

DISERTASI

OLEH

ERRY FITRYA PRIMADHANY

NIM. 210311020094

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2026

HALAMAN JUDUL

Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi Dan Tata Kelola Dalam Peraturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah di Indonesia

Disertasi
Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Ilmu Syariah

Oleh:

Erry Fitrya Primadhany
NIM. 210311020094

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Erry Fitrya Primadhany
NIM	: 210311020094
Tempat/Tanggal Lahir	: Palangka Raya, 18 April 1990
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Syariah
Fakultas/Program	: Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul, "**Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi Dan Tata Kelola Dalam Peraturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah di Indonesia"** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Erry Fitrya Primadhany

HALAMAN BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1551/Un.14/IV/UPM-BP/05/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat **https://www.turnitin.com**, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama	: Erry Fitrya Primadhany
NIM	: 210311020094
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	: Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi Dan Tata Kelola Dalam Peraturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah di Indonesia

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil **kurang dari 20%** Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERTUTUP.**

Banjarmasin, 26 Mei 2026

Wakil Direktur Pascasarjana

Dr. Wahyudin, M.Pd.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1586/Un.14/IV/UPM-BP/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat **https://www.turnitin.com**, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama	: Erry Fitrya Primadhany
NIM	: 210311020094
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	: Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi Dan Tata Kelola Dalam Peraturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah di Indonesia

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil **kurang dari 20%** Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERBUKA.**

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Wakil Direktur Pascasarjana

Dr. Wahyudin, M.Pd.I.

HALAMAN PERSETUJUAN

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

REKONSTRUKSI KETENTUAN MANFAAT EKONOMI DAN TATA KELOLA DALAM PERATURAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Erry Fitrya Primadhany

NIM. 210311020094

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk

Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA.	Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M. Fin.
Tanggal, ... 17/6/2026	Tanggal, ... 18/6/2026

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi yang berjudul **" Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi Dan Tata Kelola Dalam Peraturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah di Indonesia"** ditulis oleh Erry Fitrya Primadhany NIM. 210311020094 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin:

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Juli 2026

Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 197112091996031001

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA (Ketua/Penguji)	1 .....
2	Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., MA. (Penguji Utama)	2 .....
3	Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA (Penguji)	3 .....
4	Dr. Syarifuddin, M.Ag (Penguji Eksternal)	4 .....
5	Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H (Penguji)	5 .....
6	Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M. Fin (Penguji)	6 .....
7	Dr. H. Nispan Rahmi, M.Ag (Penguji/Sekretaris)	7 .....

ABSTRAK

Erry Fitrya Primadhany. NIM. 210311020094. *Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi Dan Tata Kelola Dalam Peraturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah di Indonesia*. Pembimbing I: Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA. Pembimbing II: Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M. Fin. Pada Program Studi Doktoral Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2026.

Kata Kunci: Rekonstruksi; Manfaat Ekonomi; Tata Kelola; Regulasi LPBBTI Syariah; Prinsip Syariah.

Perkembangan digitalisasi sektor jasa keuangan telah mendorong lahirnya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), diantaranya model pendanaan berbasis syariah yang berkembang sebagai alternatif pembiayaan digital. Meskipun LPBBTI Syariah memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan, pengaturan mengenai manfaat ekonomi dan tata kelola yang berlaku saat ini belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik akad syariah, khususnya pada aspek nisbah bagi hasil, pembagian risiko, dan tanggung jawab para pihak.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup: Bagaimana pengaturan manfaat ekonomi dan tata kelola penyelenggara dalam regulasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah yang berlaku saat ini? dan bagaimana rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mampu menjamin keselarasan dengan prinsip syariah, perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta pembagian risiko dan tanggung jawab yang adil dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan manfaat ekonomi dan tata kelola LPBBTI Syariah yang saat ini diatur melalui POJK, SEOJK, dan Fatwa DSN-MUI masih menyisakan sejumlah persoalan normatif berupa ketidakjelasan konsekuensi hukum dari istilah pada manfaat ekonomi ketika diterapkan pada akad syariah, kecenderungan penyamaan nisbah dengan mekanisme manfaat ekonomi yang bersifat tetap, belum optimalnya tata Kelola berupa penerapan prinsip *risk sharing*, serta belum tegasnya pengaturan tanggung jawab penyelenggara dalam mitigasi risiko dan perlindungan investor.

Kebaruan disertasi ini terletak pada rekonstruksi manfaat ekonomi dan tata kelola LPBBTI Syariah melalui pemisahan terminologi nisbah, margin, *ujrah*, dan bunga, serta pengembangan model manajemen risiko syariah yang membedakan risiko bisnis murni dari risiko akibat kelalaian penyelenggara, sehingga perlindungan investor, kepastian hukum, dan prinsip *ḥifẓ al-māl* dapat diwujudkan secara lebih proporsional

ABSTRACT

Erry Fitrya Primadhany. NIM. 210311020094. Reconstruction of Economic Benefit and Governance Provisions in the Regulatory Framework for Information Technology-Based Peer-to-Peer Financing Services in Accordance with Sharia Principles in Indonesia. Supervisor I: Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A. Supervisor II: Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si., M.Fin. Doctoral Program in Islamic Law (Ilmu Syariah), Postgraduate School, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2026.

Keywords: Reconstruction; Economic Benefit; Governance; Sharia-Based LPBBTI Regulation; Sharia Principles.

The rapid digitalization of the financial services sector has given rise to Information Technology-Based Peer-to-Peer Financing Services (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, hereinafter LPBBTI), including sharia-compliant financing models that have emerged as viable alternatives to conventional digital financing. Despite the considerable potential of Sharia-Based LPBBTI in advancing financial inclusion, the existing regulatory provisions governing economic benefits and governance have yet to be fully aligned with the fundamental characteristics of sharia contracts (akad), particularly with respect to profit-sharing ratios (nisbah), risk-sharing mechanisms, and the allocation of responsibilities among contracting parties.

This study addresses two research questions. First, how are economic benefits and platform governance currently regulated under the applicable Sharia-Based LPBBTI regulatory framework, particularly in relation to sharia compliance and the distribution of risk among the parties involved? Second, how should the provisions governing economic benefits and governance in Information Technology-Based Peer-to-Peer Financing regulations be reconstructed so as to ensure alignment with sharia principles, consumer protection, legal certainty, and a just and proportionate allocation of risk and responsibility in the operation of Sharia-Based LPBBTI in Indonesia?

This study employed a normative legal research method, incorporating philosophical, statutory, and conceptual approaches. This method was adopted on the ground that the study was primarily concerned with the internal consistency and adequacy of existing legal norms rather than with empirical social phenomena. Legal materials were obtained from primary, secondary, and tertiary sources through systematic library research.

The findings reveal that the current regulatory framework governing economic benefits and governance in Sharia-Based Information Technology Peer-to-Peer Financing Services (LPBBTI Syariah), as stipulated in POJK, SEOJK, and DSN-MUI Fatwas, still contains several normative deficiencies, including ambiguity in the concept of economic benefits, a tendency to equate profit-sharing ratios (*nisbah*) with fixed-return mechanisms, the inadequate implementation of the risk-sharing principle within governance arrangements, and the absence of clear provisions concerning platform operators' responsibilities for risk mitigation and investor protection.

The principal novelty of this dissertation lies in its reconstruction of the economic benefit and governance framework for Sharia-Based LPBBTI through the explicit terminological differentiation of profit-sharing ratios (nisbah), mark-up margins (margin), service fees (*ujrah*), and interest (bunga), as well as the development of a sharia-based risk management model that distinguishes pure business risk from risk arising from platform operator negligence. Through this reconstruction, investor protection, legal certainty, and the principle of *ḥifẓ al-māl* (preservation of wealth) can be more proportionately and coherently achieved within the existing legal order.

ملخص الرسالة

إيري فطريا فريماضاني. رقم القيد**٢١٠٣١١٠٢٠٠٩٤ :إعادة بناء ضوابط المنافع الاقتصادية و اللوائح التنظيمية فى قانون لخدمة التمويل الجماعي التي تقوم علي تكنولوجيات المعلومات بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في إندونيسيا**

المشرف الأول: الأستاذ الدكتور **شوقي مبارك سيف**، الماجستير.

المشرف الثاني: الدكتور الحاج **زكي مبارك**، الماجستير في العلوم، والماجستير في التمويل.

برنامج الدكتوراه في علوم الشريعة، كلية الدراسات العليا، جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين، إندونيسيا، سنة ٢٠٢٦م.

الكلمات المفتاحية :إعادة البناء؛ المنافع الاقتصادية؛ الحوكمة؛ تنظيم خدمات التمويل المشترك الشرعية القائمة على تكنولوجيا المعلومات؛ مبادئ الشريعة الإسلامية.

أدّت التطورات المتسارعة في رقمنة قطاع الخدمات المالية إلى ظهور خدمات التمويل المشترك القائمة على تكنولوجيا المعلومات(LPBBTI) ، ومن بينها نماذج التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تطورت بوصفها بديلاً للتمويل الرقمي. وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها هذه الخدمات في دعم الشمول المالي، فإن الأحكام التنظيمية المتعلقة بالمنافع الاقتصادية والحوكمة لا تزال غير منسجمة بصورة كاملة مع الخصائص المميزة للعقود الشرعية، ولا سيما فيما يتعلق بنسبة توزيع الأرباح (النِّسبة)، وتقاسم المخاطر، ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة.

وتتمثل إشكالية هذا البحث في السؤالين الآتيين: كيف يتم تنظيم المنافع الاقتصادية وحوكمة الجهات المشغلة في اللوائح المنظمة لخدمات التمويل المشترك القائمة على تكنولوجيا المعلومات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المعمول بها حالياً؟ وكيف يمكن إعادة بناء أحكام المنافع الاقتصادية والحوكمة في هذه اللوائح بما يضمن التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحماية المستهلك، وتحقيق اليقين القانوني، وتوزيع المخاطر والمسؤوليات توزيعاً

عادلاً في تطبيق خدمات التمويل المشترك الشرعية القائمة على تكنولوجيا المعلومات في إندونيسيا؟

اعتمدت هذه الدراسة إستعملت منهج القانوني المعياري باستخدام المقاربات الفلسفية والقانونية والمفاهيمية. وقد جُمعت البيانات من المصادر القانونية الأولية والثانوية والثالثية من خلال الدراسة المكتبية وتحليل الوثائق القانونية ذات الصلة.

نتائج البحث من هذه الدراسة هي أن تنظيم المنافع الاقتصادية والحوكمة في خدمات التمويل المشترك الشرعية القائمة على تكنولوجيا المعلومات، والمنصوص عليه حالياً في لوائح هيئة الخدمات المالية الإندونيسية(POJK) ، ومنشوراتها التفسيرية (SEOJK)، وفتاوى المجلس الوطني للشريعة – مجلس العلماء الإندونيسي-(DSN MUI)، لا يزال يثير عدداً من الإشكالات المعيارية، من أبرزها: عدم وضوح الآثار القانونية لمفهوم المنافع الاقتصادية عند تطبيقه على العقود الشرعية، والاتجاه إلى مساواة النِّسبة بآليات المنافع الاقتصادية ذات العائد الثابت، وعدم اكتمال تطبيق مبدأ تقاسم المخاطر في الحوكمة، فضلاً عن غياب النصوص الصريحة التي تحدد مسؤولية الجهة المشغلة في إدارة المخاطر وحماية المستثمرين.

وتكمن الحداثة العلمية لهذه الرسالة هي إعادة بناء مفهوم المنافع الاقتصادية والحوكمة في خدمات التمويل المشترك الشرعية القائمة على تكنولوجيا المعلومات، من خلال التمييز الواضح بين مصطلحات **النِّسبة**، و**الهامش الربحي (المرابحة)**، و**الأجرة (الأجر على الخدمة)**، و**الفائدة الربوية**، إلى جانب تطوير نموذج لإدارة المخاطر وفق المنظور الشرعي يفرق بين المخاطر التجارية البحتة والمخاطر الناجمة عن تقصير الجهة المشغلة أو إهمالها. ومن شأن هذه الإعادة البنائية أن تسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وتحقيق اليقين القانوني، وتفعيل مقصد **حفظ المال (حفظ المال)** بصورة أكثر توازناً وتناسباً

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta kekuatan yang dianugerahkan sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Syariah.

Penelitian dalam disertasi ini mengangkat tema *"Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola dalam Peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang Sesuai dengan Prinsip Syariah di Indonesia."* Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan, terutama di bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang berlandaskan prinsip syariah.

Dalam proses penyusunan disertasi ini, peneliti memperoleh bantuan, dukungan, serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan kesempatan yang telah diberikan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan gagasan dan konsep penelitian yang diyakini memiliki potensi untuk memberikan sumbangsih positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup objek penelitian. Atas dasar itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;
3. Bapak Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA. dan Bapak Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M. Fin selaku pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan semangat untuk segera menyelesaikan disertasi ini;

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H, selaku Ketua Prodi S3 Ilmu Syariah yang dengan seksama memberikan arahan yang sangat bermanfaat pada penyelesaian disertasi.
5. Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., selaku Sekretaris Prodi S3 Ilmu Syariah yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga untuk penyelesaian disertasi ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Syariah angkatan 2021 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Ayahanda Drs. H. Suryadi dan ibunda Dra. Hj. Gusti Ruhani, S.Ag. yang senantiasa memberikan doa, motivasi, kasih sayang, serta nasihat yang berharga kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian disertasi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada mertua tercinta, Bapak Wahyu Erwandi (Almarhum) dan Ibu Hj. Nuraidah, S.Pd., atas dukungan, perhatian, dan doa yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
10. Suami tercinta, Yunizar Prajamufti, S.HI., M.H., yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, kesabaran, serta semangat kepada penulis dalam setiap proses penyusunan disertasi ini. Terima kasih atas pengorbanan, motivasi, dan pendampingan yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
11. Saudara tercinta Dr. Esty Aryani Safithry, S.Psi., M.Psi., Psikolog, yang telah memberikan dukungan, perhatian, motivasi, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan disertasi ini. Terima kasih atas doa, nasihat, dan kepedulian yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

12. Pimpinan dan seluruh rekan kerja di Fakultas Syariah UIN Palangka Raya yang telah memberikan dukungan, kerja sama, motivasi, serta bantuan kepada penulis selama proses penyusunan disertasi ini. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
13. Pimpinan UIN Palangka Raya beserta segenap civitas akademika yang telah memberikan dukungan, fasilitas, motivasi, serta lingkungan akademik yang kondusif kepada penulis selama menempuh studi dan menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih atas perhatian, kerja sama, dan kontribusi yang diberikan sehingga proses penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan himbauan yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan. Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi penulis, universitas, dan pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Penyusunan ini berdasarkan SKB Menteri Agama & Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang secara sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada pedoman transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab	Nama	Huruf Latin	Indonesia
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Ba
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	ṡ (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥ (titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	Ż	Ż (titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	ṣ (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	ḍ (titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	ṭ (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓ (titik di bawah)
ع	'ain	`	` (koma terbalik)
غ	Gain	gh	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Pengucapan vokal pada bahasa Arab, selayaknya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal mono (monoftong) dan vokal ganda (diftong). Vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat, dengan transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Tertulis
ـَ	Fathah	a
ـِ	Kasrah	i
ـُ	Dammah	u

Sedangkan pada vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, pada transliterasinya ditulis dengan dua huruf, sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Ganda

Huruf Arab	Jenis Transliterasi	Tertulis	Kata	Tertulis
يْ	Fathah dan Ya' mati	ai		Bainakum
وْ	Fathah dan Wawu Mati	au		Yaum

Pada vokal panjang (maddah) yang dilambangkan dengan harakat, transliterasinya berupa tanda berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Kata Arab
ا ... ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas	Jāhiliyyah
... ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas	ramā
... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas	yaqūlu

Pada vokal pendek yang berurutan dalam satu kata atau penulisan kata yang ada sisipan huruf hamzah ditengah atau diakhir kata, maka transliterasinya dipisahkan dengan lambang apostrof, tidak berlaku apabila huruf hamzah berada di awal kata, karena dilambangkan dengan transliterasinya berupa huruf alif, semisal sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Pendek dengan Hamzah

Arab	Latin

لَئِن شَكَرْتُمْ	La'in syakartum
شَيْءٌ	Syai'un
أَنْتُمْ	A'antum
إِنَّ	Inna

C. Tā' Marbutāh pada akhir kata

Terdapat dua transliterasi Tā' Marbutāh, yakni:

1. Tertulis pada akhir kata, tersambung dengan kata sesudahnya dan mempunyai harakat, maka transliterasinya adalah dengan menuliskan "t" Seperti:

Tabel Tā' Marbutāh Pada Akhir Kata Bersambung

Arab	Latin
رَوْضَةُ ٱلجَنَّةِ	Rauḍatul Jannah
ٱلمَدِينَةُ ٱلمُنَوَّرَة	Al-Madīnatul Munawwarah

2. Tertulis pada akhir kata dan tidak tersambung dengan kata lain, serta bukan bahasa arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, niat, dan semisalnya, terkecuali, ingin menguraikan kata aslinya, maka transliterasinya tertulis "h"

Tabel Tā' Marbutāh Pada Akhir Kata Tidak Bersambung

Arab	Latin
طَلْحَةُ	Ṭalḥah
جِزْيَةٌ	Jizyah

D. *Tasydīd* (Syaddah)

Tasydīd dalam tulisan arab dilambangkan dengan tanda ◌ّ apabila ditranliterasikan dengan huruf, maka penulisannya dengan huruf yang terdapat tanda tersebut ditulis ganda, sebagai contoh:

Tabel Transliterasi Tasydid

Arab	Latin
عِدَّةٌ	'Iddah
نَزَّلَ	Nazzala

E. Kata Sandang Alif Lam

Kata sandang dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf "ال", tetapi dalam transliterasi kata sandang dibedakan:

1. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah, maka dituliskan dengan tetap menyebutkan "al", sebagaimana contoh berikut:

Tabel Transliterasi Penulisan Alif Lam Qamariyyah

Arab	Latin
ٱلْقُرْآنُ	Al-Qur'an
ٱلْكِتَابُ	Al-Kitābu

Adapun huruf Qamariyyah, adalah:

Tabel Transliterasi Huruf Qamariyyah

Huruf Arab	Keterangan
ا Alif	– (tidak dilambangkan)
ب Ba	b
ج Jim	j
ح Ḥa	ḥ

خ Kha	kh
ع 'Ain	'
غ Gain	gh
ف Fa	f
ق Qaf	q
ك Kaf	k
م Mim	m
ه Ha	h

2. Bila diikuti dengan huruf syamsiyah, maka dituliskan dengan menghapus huruf "ل" dan langsung diikuti dengan huruf setelahnya ditulis rangkap, sebagaimana contoh berikut:

Tabel Transliterasi Penulisan Alif Lam Syamsiyah

Arab	Latin
الرَّجُلُ	Ar-Rajulu
الشَّمْسُ	Asy-Syamsyu

Adapun Huruf Syamsiyah, adalah:

Tabel Transliterasi Huruf Syamsiyah

Huruf Arab	Keterangan
ت Ta	t
ث Ṡa	ṡ
د Dal	d
ذ Żal	ż
ر Ra	r

ز Zai	z
س Sin	s
ش Syin	sy
ص Ṣad	ṣ
ض Ḍad	ḍ
ط Ṭa	ṭ
ظ Ẓa	ẓ
ل Lam	l
ن Nun	n

F. Penulisan Kata yang dirangkai Kalimat

1. Kata disambung dengan alif lam qamariyyah:

Tabel Transliterasi Kata disambung (Qamariyyah)

Arab	Latin
فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ	fī laylati al-qadr
فِي ٱلْكِتَابِ كَانَتْ أَمَّةً قَائِمَة	Fī al-kitābi kānat ummatan qā'imah

2. Kata disambung dengan alif lam syamsiyah:

Tabel Transliterasi Kata disambung (Syamsiyah)

Arab	Latin
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا	Wa asy-syamsi wa ḍuḥāhā
اهْدِنَا الصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ	Ihdinā aṣ-ṣirāṭa al-mustaqīm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
HALAMAN BUKTI BEBAS PLAGIASI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN xiv
DAFTAR ISI xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 11
D. Definisi Operasional 12
1. Rekonstruksi 12
2. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 13
3. Manfaat Ekonomi Pendanaan 14
4. Tata Kelola 17
E. Penelitian Terdahulu 18
F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir 23
1. *Grand Theory* 23
2. *Middle Theory* 28
3. *Applied Theory* 31
G. Metode Penelitian 45
1. Jenis Penelitian 45
2. Pendekatan Penelitian 46
3. Sumber Data 48
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 50
5. Analisis Bahan Hukum 50

H. Sistematika Penulisan 52
BAB II KONSEP LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SYARIAH 52
A. Definisi dan Karakteristik Pendanaan Bersama 52
B. Pendanaan Berbasis Teknologi 57
C. Pendanaan Bersama Syariah 68
1. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pendanaan Bersama 70
2. Model Akad Pendanaan Bersama Syariah 73
3. Regulasi Pendanaan Bersama Syariah di Indonesia 74
4. Perbedaan Pendanaan Bersama Syariah dan Konvensional 74
5. Pendanaan Syariah Berbasis Teknologi 76
D. Konsep Manfaat Ekonomi dalam Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi 83
E. Manfaat Ekonomi Pada LPBBTI Syariah 86
F. Peran Pendanaan Bersama dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 88
G. Model Pendanaan Bersama 90
1. *Peer-to-Peer Lending Syariah* 90
2. Eksistensi *Crowdfunding* Syariah pada UMKM 91
3. Kerangka Regulasi dan Pengawasan Syariah 92
H. Manajemen Risiko dalam LPBBTI Syariah 94
BAB III Ketentuan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola Dalam Peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah Di Indonesia 102
A. Dasar Hukum LPBBTI Syariah 103
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) 104
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 108
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah . 113
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK 116
5. Fatwa DSN-MUI 121
B. Pengaturan Batasan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah 131
1. Ruang Lingkup Manfaat Ekonomi 131

2. Regulasi Ketentuan Batasan Manfaat Ekonomi 135
3. Pengaturan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Penyelenggara..... 142
C. Implikasi Ketentuan Manfaat Ekonomi terhadap LPBBTI Syariah..... 147
1. Manfaat Ekonomi sebagai Bagian dari Struktur Pembiayaan..... 147
2. Manfaat Ekonomi LPBBTI Syariah dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak..... 152
3. Manfaat Ekonomi LPBBTI Syariah dan Kepastian Hukum 155
BAB IV Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola Dalam Peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah Di Indonesia..... 158
A. Telaah Ketentuan Manfaat Ekonomi dan tata Kelola dalam Regulasi Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi..... 159
1. Eksistensi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 159
2. Akad *Muḍārabah* dan Karakteristiknya dalam LPBBTI Syariah 166
3. Penetapan Imbal Hasil dalam Perspektif Syariah..... 173
4. Telaah Tata Kelola dalam Regulasi LPBBTI..... 181
5. Telaah Manfaat Ekonomi dalam Regulasi LPBBTI 184
6. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Ketentuan LPBBTI 191
B. Konseptualisasi Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah 195
1. Prinsip Syariah dalam Perwujudan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola 197
2. Etika Bisnis Islam pada transaksi LPBBTI Syariah..... 205
3. Perlindungan Hukum pada Aktivitas LPBBTI Syariah 220
4. Aspek Keadilan pada LPBBTI Syariah..... 224
C. Model Rekonstruksi Ketentuan Manfaat Ekonomi dan Tata Kelola dalam Regulasi LPBBTI Syariah..... 230
1. Rekonstruksi Definisi Manfaat Ekonomi dan Terminologi bunga/margin/bagi hasil pada regulasi LPBBTI 234
2. Rekonstruksi Mekanisme Pembagian Hasil..... 240
3. Rekonstruksi Model Tata Kelola LPBBTI Syariah..... 246
4. Rekonstruksi Manajemen Risiko 263
5. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Para Pihak 273

6. Integrasi Kebijakan Ekonomi berbasis Syariah dengan dengan *Maqāṣid al-syarī'ah* 283
BAB V PENUTUP 301
A. Simpulan 301
B. Saran 302
DAFTAR PUSTAKA 308